Respon Ulama Kontemporer Menanggapi Beberapa Isu dalam Pluralisme Agama di Malaysia

Oleh: Mohamed Sabir Jamaludin[1], Nik Mohd Zaim Ab Rahim[2], Mohd Al'ikhsan Ghazali[3], Azizi Shukri Abdul Shukor[4]

Abstract

Thhe Response of Contemporary Scholars (Ulama) in Responding Some Issue on Religious Pluralism Malaysia

The issue of religious pluralism cause unrest in the Muslim community in our country. She can wear away the belief that a thin majority of Muslims faith. This paper aims to examine the challenges facing the contemporary scholars the issue of pluralism is increasingly transmitted in Malaysia. This study is a qualitative assessment form. The method used to obtain the data documentation while inductive and deductive methods to analyze the data before formulating conclusions rather than facts presented. There are various issues that are the focus of experts. This paper only focuses on a few specific issues. Between that needs to be addressed is apostasy and conversion of religion, interfaith love, celebrations and religious rituals together, use the sentence of Allah by non- Muslims, Muslim community leaders half a tendency to bring messeage pluralism in their speech, whether they realize it contains elements of pluralism or vice versa. Precisely, the contemporary scholars should always be sensitive, responsive in identifying issues that touch of religious pluralism, either express or implied. Strictly speaking, they are very concern and dexterity required to handle it wisely and will demonstrate their ability to meet the challenges of the times.

Keywords: *Challenge, contemporary scholars, religious issues, and pluralism*

Pendahuluan

Fenomena beragama adalah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Berbagai agama dan aliran telah lahir sejak manusia beragama. Antara aliran beragama yang muncul ialah pluralisme agama. Ia lahir di Barat pada abad ke-20 yang bertitik tolak dari andaian bahwa pertumpahan darah yang banyak terjadi di dunia adalah akibat dari sikap eksklusif dalam mengemukakan kebenaran. Bertolak dari andaian inilah, banyak pemikir dan teolog Barat melihat bahwa paham pluralisme agama adalah satu-satunya jalan keluar bagi menangani sikap saling bermusuhan dan sikap intoleran masyarakat beragama yang mencetuskan peperangan yang panjang, baik sesama penganut Kristen, Katholik, dan Mormon, maupun antaragama, seperti antara penganut agama Kristen dengan penganut Yahudi, dan penganut atau ideologi lain. Ia juga dilihat dapat mengurangi ketegangan antara dunia Barat dengan dunia Islam. Karena itulah, pluralisme semakin mendapat tempat dan ramai dibicarakan di dunia Islam pasca insiden 11 September sebagai jalan penyelesaian dalam menangani ekstrimisme dan terorisme yang dilakukan oleh segelintir umat Islam (Khalif Muammar, 2013: 1). Pluralisme juga adalah isu penting bagi umat Islam karena ia terkait dengan status orang non-muslim (*ahl al-dhimmah*), seperti yang terkandung dalam undang-undang Islam sebagai golongan yang perlu dilindungi (Esposito, 2004:355).

Justeru, Pluralisme sering kali dianggap "suatu bentuk toleransi yang paling berkesan" dalam menangani perbedaan agama di dunia ini. Bahkan toleransi dianggap sebagai salah satu prinsip penting dalam Pluralisme. Ini ditambah lagi dengan pernyataan setiap agama bahwa mereka adalah benar. Dengan demikian, pluralisme sebenarnya lebih merupakan satu paham baru, sama seperti *humanisme, atheisme*, dan lain-lain lagi. Mereka lebih mementingkan rasional pemikiran daripada berpandukan kepada dalil-dalil naqli. Pluralisme agama ini telah menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita. Ia dapat melunturkan keyakinan sebagian umat Islam yang tipis akidahnya. Bertolak daripada prinsip toleransi inilah, tulisan ini bertujuan meneliti tantangan yang dihadapi para ulama kontemporar terhadap isu pluralisme yang semakin menular di Malaysia.

Tulisan ini hanya menyentuh tiga isu saja, yaitu isu murtad dan konversi agama, isu cinta lintas agama, dan isu perayaan dan pelaksanaan ritual keagamaan bersama.

Murtad dan Konversi Agama

Tantangan pertama yang perlu ditangani oleh para ulama dan cendiawan muslim di Malaysia ialah murtad dan konversi agama. Murtad adalah isu yang terjadi di sepanjang sejarah beragama. Isu ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. dan berlanjut sampai hari ini. Belakangan ini, murtad menjadi satu fenomena disebabkan oleh berbagai faktor intern dan ekstern umat Islam. Adapun faktor intern seperti kurangnya pengetahuan mengenai Islam, faktor percintaan, perkawinan dan perceraian, faktor kesibukan orang tua, dan faktor ekonomi dan perbadi. Sedangkan faktor eksternal antara lain faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, gerakan kristenisasi/missionari, faktor modernisasi, kelonggaran undang-undang, sistem pendidikan dan fakfor diskriminasi terhadap saudara baru (Farahwahida, t.th.: 71-93). Disebabkan faktor-faktor di atas, sebagian orang Islam agak mudah meninggalkan Islam dan memeluk agama lain. Ia diperkukuhkan pula oleh ajaran pluralisme agama melalui liberalisme yang mengajar hak kebebasan beragama, dalam arti kata bebas untuk keluar masuk agama. Seseorang itu boleh menjadi Muslim hari ini, esok menjadi Kristen, esok lusa menjadi Hindu, dan seterusnya (Anas Malik, 2010).

Kasus-kasus murtad yang melibatkan konversi agama juga dianggap sebagai isu panas dan sensitif oleh banyak pihak dan ia tidak dibicarakan secara terbuka. Menurut catatan statistik, perkara ini terus mengalami peningkatan. Kasus Lina Joy, Noraishah Bukhari, dan Hartina Kamaludin sebagai contoh telah membuka mata masyarakat sehingga menimbulkan polemik dan mendapat reaksi dari masyarakat non-muslim, para ulama dan cendekiawan muslim serta pihak pemerintah (kerajaan) sendiri.

Sehubungan itu, lebih 50 wakil NGO yang berinsprirasikan Islam telah mengadakan pertemuan dan membentuk gabungan organisasi yang dikenal sebagai PEMBELA melihat bahwa isu murtad di negara kita sudah berada di tahap yang membimbangkan, seperti usaha pihak-pihak tertentu yang mau menggugat kedudukan Islam di Malaysia. Mereka menyeru berbagai pihak termasuk pemerintah (kerajaan) agar melihat isu murtad secara jujur dan serius (Farahwahida, t.th.: 144).

Penelitian terhadap akta dan enakmen Islam di negeri-negeri, mendapati bahwa fenomenan ini muncul salah satu sebabnya adalah aturan atu hukuman yang jelas mengenai kesalahan murtad. Sebagian mahkamah syariah di negeri-negeri hanya mengenakan hukuman maksimum tiga tahun penjara atau 6 sebatan atau RM5000 sebagai denda atau kombinasi hukuman tersebut. Jelasnya bidang kuasa jenayah adalah terhad dan hanya boleh dikuatkuasakan kepada orang Islam saja.

Cinta Lintas Agama

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya cinta lintas agama, seperti pendidikan, kehidupan sosial, media massa, dan hiburan.

Pertama, sistem pendidikan di institusi pendidikan dalam dan luar negeri dengan aktivitias dan pembelajaran yang bercampur dengan belragai latar belakang agama. Penglibatan pembelajaran dan komunikasi tanpa ada batasan agama menyebabkan pelajar berhubung tanpa menitikberatkan agama sebagai sempadan. Kekerapan berada dalam kelompok yang sama dalam tempoh pembelajaran sekitar 3 sapai 5 tahun membuka banyak ruang untuk mengenal pasangan dengan melihat seterusnya menjurus ke alam percintaan dengan mengabaikan panduan agama. Pelajar terlibat dengan pembelajaran secara kelompok kecil dan bercampur pula dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin serta agama menyumbang kepada hubungan percintaan ini.

Kedua, kehidupan sosial tanpa batas, baik secara langsung maupun tidak langsung juga menyumbang kepada alam percintaan lintas agama. Percampuran dalam aktivitas secara terbuka, seperti berorganisasi dan terlibat dengan aktivitas kemasyarakatan membuka ruang untuk mengenal dengan lebih dekat. Dalam satu organisasi yang memperjuangkan isu-isu tertentu membuat anggotanya yang berbeda latar belakang agama dan jenis kelamin sering bertemu, baik dalam berbagai pertemuan maupun pelaksanaannya di lapangan. Ini membuka ruang kepada pasangan yang berlatarbelakang agama yang berbeda mengenal pasangan dengan lebih dekat. Maka ruang percintaan akan mulai berkembang dan agama sudah tidak menjadi ukuran dalam membuat pertimbangan.

Tidak kurang juga yang terlibat dengan rekan sosial di dunia maya, seperti *facebook*, *twitter*, dan

sebagainya membuka jaringan yang lebih luas untuk berkomunikasi tanpa batas dengan siapa saja. Komunikasi di dunia maya ini memberi pengaruh besar kepada individu untuk mengenal pasangan masing-masing tanpa ada kontrol dan perhatian dari orang lain. Komunikasi di dunia maya lebih cepat dan senantiasa dapat dicapai tidak kira waktu akan membuka ruang percintaan. Hubungan sosial di alam maya bukan hanya membaca pesan saja, bahkan dapat berhubungan langsung melalui suara dan gambar juga akan merapatkan lagi hubungan pasangan yang berbeda agama. Akhirnya ia akan mewujudkan percintaan di alam maya dengan ikatan perkawinan yang tidak mengambil penting agama pasangan masing-masing.

Ketiga, pengaruh media sosial seperti rancangan hiburan seperti tayangan film, artis, dan penyanyi juga menyumbang kepada percintaan lintas agama. Minat kepada pelakon tertentu serta sering menjadikan artis sebagai pujaan hidup. Bagi mereka yang minat kepada golongan ini akan senantiasa mengikuti perkembangan hidup artis dan pelakon pujaan mereka. Maka gaya hidup artis dan pelakon pujaan mereka akan meresap secara tidak langsung dalam kehidupan. Sebagai contoh, perkawinan campur antara Shah Rukh Khan dan Mandira mengikut ideologi pluralisme agama yang menganggap semua agama adalah sama akan menjadi contoh dan panutan para peminat ekstrim mereka. Sensitivitas terhadap agama sudah tidak ada dan menerima hal tersebut atas dasar cinta. Agama sudah tidak lagi menjadi ukuran benar atau salah.

Perayaan Bersama Hari Besar Agama

Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama dituntut agar hidup dalam aman harmoni tiada persengketaan, baik antara sesama maupun antara mereka yang berbeda agama. Kampanye-kampanye sering dilakukan oleh pihak kerajaan agar semua kaum bersatu dengan mewujudkan sebuah negara bangsa Malaysia.

Seruan setakat bersatu dan menjauhi permusuhan antara semua penduduk adalah perkara yang normal. Semua pihak, termasuk umat Islam di Malaysia malah di mana saja akan bersetuju dengan slogan tersebut. Seruan tersebut kemudiana menjadi lebih terbuka dan berani dengan menggalakkan semua lebih bertoleransi sehingga dapat ikut serta dalam upacara keagamaan penganut agama lain.

Isu ini mungkin tidak menjadi masalah bagi penganut agama selain Islam, lantaran tiada sekatan dalam agama mereka untuk bertindak demikian. Bagi umat Islam, tentu isu ini menjadi isu yang besar karena melibatkan akidah yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Perkara ini sudah jelas sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Kafirun (QS 109: 1-6):

> *" Katakanlah (wahai Muhammad): " Hai orang-orang kafir!, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku."*

Menurut Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah ketika menjelaskan hadits "Sesiapa yang menyamai (*tasyabbuh*) dengan sesuatu kaum, maka ia tergolong dalam kaum tersebut" (Riwayat Ahmad dan dikatakan sahih oleh al-Albani). Hadits ini membawa pengertian bahwa seringan-ringan hukuman adalah dalil pengharaman *tasyabbuh* walaupun pada teks hadits ini menunjukkan makna kufur orang yang meniru atau menyerupai orang-orang kafir, seperti yang dipahamkan dari ayat yang bermaksud sesiapa yang melantik mereka di kalangan kamu, maka ia tersendiri akan tergolong dalam kalangan mereka.

Imam al-San'ani pula berpandangan apabila seseorang meniru atau menyerupai pakaian orang kafir dan ia beriktikad bahwa ia menyerupai si kafir itu, maka hukumnya adalah ia jatuh kafir tetapi jika ia tidak beriktikad begitu maka berlaku khilaf di kalangan fuqaha'. Ada ulama yang mengatakan tetap kufur berdasar makna zahir hadits dan ada yang menghukumkan tidak kufur tetapi hendaklah dihukum.berdasarkan ayat dan hadits di atas dan juga dalil-dalil yang lain jelas menunjukkan haramnya melakukan apa saja upacara keagamaan agama lain. Mesyuarat Jawatan kuasa Syariah Negeri Perak Kali Ke-162 yang bersidang pada 19 Muharam 1425 bersamaan 11 Mac 2004 telah membuat keputusan bahwa merayakan/menyerupai perayaan orang kafir adalah haram.

Peranan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim

Para ulama dan cendekiawan Muslim dalam berbagai sektor perkhidmatan hendaklah memainkan peranan dalam menangani isu pluralisme agama ini di Malaysia. Mereka hendaklah bersungguh-sungguh

dan menggembleng sumber yang ada ke arah mempastikan isu pluralisme dapat dibendung malah diberantas sampai ke akar-akarnya.

Peranan Ulama Terhadap Isu Murtad dan Konversi Agama

Di Malaysia, semua undang-undang yang dibentuk setelah kemerdekaan adalah tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan di mana ia adalah institusi dan sumber perlembagaan yang tertinggi. Jika suatu undang-undang atau khususnya enakmen perundangan Islam negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, maka bagian yang bertentangan akan terbatal. Ini jelas dinyatakan dalam Perkara 4 (1) Perlembagaan Persekutuan.

Justeru, antara tugas dan tanggung jawab para ulama ialah memartabatkan institusi kehakiman, khususnya mahkamah syariah dinaiktarafkan agar setaraf atau lebih tinggi dari mahkamah sivil. Ia selaras dengan peruntukan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahwa Islam adalah agama persekutuan. Sudah tiba masanya sistem perundangan Islam dilaksanakan secara menyeluruh dan bidang kuasa mahkamah syariah diperluas untuk mengendalikan berbagai kasus umat Islam bukan hanya yang ada kini melibatkan undang-undang diri dan keluarga Islam saja. Pelaksanaan sistem perundangan Islam secara menyeluruh adalah manifestasi daripada Perkara 3 Perlembagaan Pesekutuan yang menyebut "*Islam is the religion of the Federation*."

Di Selangor misalnya, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri (2003) telah memperuntukkan di dalam Seksyen 61 (3)(b)(x) yang memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor di bawah bidang kuasa malnya untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan dan prosiding itu, antara lain berhubung dengan pengisytiharan bahwa seseorang itu bukan lagi orang Islam (Zulkifli Hasan & Norfadhilah, 2007:6).

Selain itu, cadangan beberapa tokoh yang memegang jabatan penting di kerajaan amatlah dialu-alukan bagi menangani isu ini. Antara tokoh yang pernah memberikan saran ialah Datuk Sheikh Ghazali Abdul Rahman, ketika memegang jabatan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Beliau menegaskan akan kepentingan pewujudan akta perlindungan akidah sebagaimana kenyataan beliau dalam akhbar Utusan Malaysia (2006):"*Akta perlindungan akidah perlu diwujudkan di semua peringkat bagi menangani gejala murtad di kalangan umat Islam di negara ini*."Tambah beliau lagi, "*Dengan adanya akta tersebut, kita berupaya mengambil inisiatif awal seperti memberi khidmat kaunseling dan nasihat kepada mereka*," katanya kepada pemberita pada Seminar Pertukaran Agama dan Kesan Dari Segi Perspektif Syariah dan Perundangan di Dewan Auditorium Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) ketika itu.

Jelasnya, adalah menjadi tanggung jawab muslim membantu apabila saudaranya dizalimi atau teraniaya. Justeru, dalam konteks ini, murtad dapat dilihat sebagai satu bentuk kezaliman dan penganiayaan ke atas diri sendiri dan harus ada peraturan atau enakmen bagi pihak berkuasa untuk menjamin dan melindungi akidah umat Islam.

Peranan Ulama Menangani Isu Cinta Rentas Agama

Mereka perlu berperan semampu mungkin dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan media massa. Dalam konteks pendidikan, mereka perlu lebih peka dan responsif terhadap arah tuju pendidikan negara dari waktu ke waktu, khususnya di institusi pengajian tinggi, di samping berusaha menjadi pembuat kebijakan dan penggerak kepada institusi pendidikan tersebut dalam merangka modul serta kaedah pengajaran yang murni. Penglibatan dengan menganjurkan program yang berkala dan tersusun diinstitusi pengajian wajar diambil perhatian serius oleh para ulama yang terlibat dengan agensi keagamaan, seperti Jabatan agama negeri, pejabat mufti serta Jakim. Program-program kolokium, wacana, seminar, dan sebagainya dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar institusi pengajian untuk membincangkan isu-isu kontemporer yang melibatkan cendikiawan muslim yang berkelayakan dalam konteks perbincangan dua arah.

Selain itu, mereka juga perlu senantiasa peka dan menguasai ciri perkembangan kehidupan sosial masa kini dan rangkaiannya. Perjuangan hak asasi manusia yang tersasar jauh dari landasan agama wajar diberi perhatian serius oleh ulama untuk menjawab dan menjelaskan dengan bijak. Jawaban dan penjelasan secara konklusif dan segera perlu mendepani isu

supaya masyarakat senantiasa mendapat jawaban segera bagi menangani persoalan tersebut.

Tegasnya, para ulama perlu memahami perkembangan media sosial di alam maya. Mereka perlu menguasai dan senantiasa peka dengan aktivitas dan perkembangan informasi yang tersebar dengan cepat untuk menangani serta menjelaskan persoalan yang melibatkan agama. Adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk senantiasa memantau sebarang bentuk artikel dan posting yang di berada di alam maya tidak mampu memperdaya umat Islam menerima pandangan cinta lintas agama adalah biasa dan tidak salah.

Media Massa dan Hiburan

Kemampuan ulama memberi reaksi dan maklum balas segera terhadap apa yang berlaku di media massa juga perlu diambil perhatian serius. Perkara ini perlu diberi perhatian karena media massa adalah wahana yang berpengaruh dalam menyampaikan informasi. Unit media yang terdiri dari para cendekiawan Islam wajar fokus menggunakan media elektronik dan massa dalam menyampaikan dakwah dan menangani isu pluralisme agama.

Para artis pula mudah menjadi panutan dan dijadikan contoh teladan oleh kebanyakan orang awam. Justeru itu para ulama hendaklah bersikap terbuka dan melebarkan sayap dakwah kepada para artis dan karyawan. Penglibatan dakwah dan hubungan mesra dengan golongan artis mampu mendekatkan kepahaman Islam mereka.

Peranan Ulama Terhadap Perayaan Bersama

Keputusan haram yang dibuat oleh Majlis-majlis Agama Negeri-negeri di Malaysia berkaitan dengan isu ini, contohnya Jawatankuasa Syariah Negeri Perak masih lagi menjadi tanda tanya. Pengharaman yang diputuskan itu adakah secara mutlak atau masih ada ruang untuk dipertimbangkan keharusannya sekiranya memenuhi garis panduan tertentu.

Pengharaman secara mutlak menampakkan Islam adalah sebuah agama yang jumud, tiada toleransi dan tertutup. Penerimaan secara mutlak pula menunjukkan Islam sebuah agama yang tiada pendirian dan sama dengan agama-agama lain. Sehubungan dengan itu, peranan ulama yang berwibawa amat diperlukan untuk memastikan garis panduan yang dikeluarkan adalah sesuai dengan roh syariat Islam. Amat dikhatirkan keputusan yang dikeluarkan itu adalah dari campur tangan kuasa-kuasa ghaib yang berkepentingan.

Garis Panduan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68 yang bersidang pada 12 April 2005 telah membincangkan Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahwa:

Keputusan:

Dalam menentukan perayaan orang bukan Islam yang boleh dihadiri oleh orang Islam beberapa kriteria utama perlu dijadikan garis panduan supaya ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti berikut;

1. Majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam.

   Maksud "bertentangan dengan akidah Islam" ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan menyebabkan tercemarnya akidah umat Islam. Contohnya; menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, memasang lampu, lilin, pokok krismas dan sebagainya, menyanyikan lagu-lagu bercirikan agama, meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi, atau tanda-tanda lain pada anggota tubuh, memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian kepada agama orang bukan Islam, tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati upacara agama orang bukan Islam.

2. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak.

   Maksud "bertentangan dengan syarak" ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam. Contohnya: Memakai pakaian berwarna merah seperti *santa claus* atau pakaian lain yang melambangkan agama, menghidangkan minuman atau makanan yang memabukkan dan seumpamanya, mengadakan bunyi-

bunyian atau hiasan seperti lonceng gereja, pokok krismas, kuil atau memecah kelapa, mengadakan acara yang berunsur perjudian, penyembahan, pemujaan, khurafat dan sebagainya.

3. Majlis tersebut tidak disertakan dengan "perbuatan yang bertentangan dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam" di negara ini,

   Maksud "bertentangan dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam" ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan masyarakat Islam Negara ini yang berpegang kepada ajaran Islam berdasarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Contohnya: Percampuran bebas tanpa batas dan adab sopan, berpakaian yang mencolok mata, mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai seni kata berunsur *lucah* (porno) serta pemujaan, mengadakan program seperti pertandingan ratu cantik, laga ayam, dan sebagainya.

4. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang dapat "menyentuh sensitivitas masyarakat Islam".

   Maksud "menyentuh sensitivitas masyarakat Islam" ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan menyinggung perasaan umat Islam tentang kepercayaan dan amalan mereka. Contohnya: Ucapan-ucapan atau nyanyian berbentuk *dakyah* keagamaan bukan Islam, ucapan-ucapan yang menghina umat Islam, ucapan-ucapan yang menghina agama Islam, persembahan yang bertujuan mempersendakan pegangan agama masyarakat Islam.

5. Pihak penganjur dan orang ramai diminta mendapatkan pandangan pihak berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis perayaan orang yang bukan beragama Islam.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-78 yang bersidang pada 12 Juni 2007 telah membincangkan Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah dan Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahwa:

1. Apa jua amalan atau perlakuan orang Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan perayaan orang non-Islam sekiranya melibatkan akidah atau iktikad seperti mengiktiraf agama non-Islam atau menganggap semua agama adalah sama, maka ia ditegah oleh Islam.
2. Walaubagaimanapun sekiranya amalan atau perlakuan tersebut hanya atas dasar kemasyarakatan atau hubungan sosial antara Islam dan bukan Islam untuk tujuan perpaduan, maka ia dibenarkan oleh Islam.
3. Memberi ucapan tahniah dan selamat atau mengirimkan ucapan melalui kartu atau alat-alat telekomunikasi seperti e-mail atau sistem pesan ringkas (sms) dan sebagainya kepada orang bukan Islam sempena dengan perayaan agama mereka adalah harus, dengan syarat ucapan itu tidak mengiktiraf, memuji atau memuliakan agama bukan Islam serta tidak menggunakan sebarang simbol atau lambang keagamaan mereka dalam kiriman ucapan tersebut.

Kesimpulan

Islam mengakui perbedaan agama, namun tidak mengakui kebenaran agama lain lantaran Islam adalah satu-satunya agama yang diredai Allah. Justru para ulama dan cendekiawan muslim mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup berat dalam memastikan sistem-sistem Islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Malaysia. Keprihatinan yang amat tinggi dituntut dari mereka demi memastikan aliran pluralisme agama dapat dibendung dan diberantas dan akidah umat Islam di negara ini dapat diselamatkan.

Catatan: (Endnotes)

1 Mahasiswa Program Sarjana di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

2 Dosen pada Fakultas Tamadun Islam, UTM Kampus Kuala Lumpur.

3 Dosen pada Pusat Kajian Fiqh, Sains dan Teknologi (CFiRST), UTM.

4 Mahasiswa pada Program Sarjana di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Daftar Referensi

Anis Malik Toha. (2010). "Ciri-ciri Faham Pluralisme Agama", *Wacana Fahaman Pluralisme Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Islam*, anjuran bersama Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT) dan Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), pada hari Sabtu, 1 Mei 2010, bertempat di Conference Hall, Tingkat 3, Kulliyyah Ekonomi UIAM, Gombak. http://muafakatmalaysia.wordpress.com/tag/wacana-fahaman-pluralisme-agama/

Esposito, John L. (2004). *Ancaman Islam: Mitos atau Realiti?* Terj. Nor Azita Omar. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Farahwahida Mohd Yusoff. (t.th.). Kaedah Penyelesaian dalam menangani pertukaran agama dalam kalangan masyarakat Melayu-Islam di Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Laporan Penyelidikan UTM Vot RMC 78907.

Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdal-Halim bin Taimiyyah. (t.th.). *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*.Riyad: Maktabah al-Rushd.

Khalif Muammar. (2013). *Islam dan Pluralisme Agama*. Kuala Lumpur: CASIS UTM.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, Kali Ke-68, 12 Apr 2005 [http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/garis-panduan-orang-islam-turut-merayakan-hari-kebesaran-agama-orang-bukan-islam].

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, Kali Ke-78, 12 Jun 2007 [http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-orang-islam-mengucapkan-tahniah-dan-ucapan-selamat-bersempena-perayaan-agama-].

al-San'ani,Imam Muhammad bin Isma'il. (1995). *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram*. Makkah: Maktabah al-Tijariyyah.

Utusan Malaysia. (2006). "Wujud akta lindungi akidah. 16 Juli 2006.

Zulkifli Hasan & Norfadhilah Mohd Ali. (2007). Kedudukan murtad menurut perspektif undang-undang di Malaysia. Kertas kerja Diskusi Syariah dan Undang-undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, USIM. 17 Januari 2007.